

# **EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKINAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MISKIN DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA**

**Intan Ismariana**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[tanismariana@gmail.com](mailto:tanismariana@gmail.com)

**Indah Prabawati, S.Sos., M.Si**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum  
Universitas Negeri Surabaya  
[indahprabawati@unesa.ac.id](mailto:indahprabawati@unesa.ac.id)

## **Abstrak**

Program Pemberian Permakinan bagi Penyandang Disabilitas Miskin merupakan upaya Pemerintah Kota penyandang disabilitas yang miskin/terlantar. Program diberikan berupa makanan siap makan yang dikelola di masing-masing kelurahan dan didistribusikan ke penerima program setiap hari oleh petugas kirim. Lokasi penelitian ini adalah Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan penerima manfaat sebanyak 56 jiwa. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan evaluasi program pemberian permakinan bagi penyandang disabilitas miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn yang meliputi : efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan. Teknik analisis data menggunakan teknik menurut Miles and Huberman. Hasil penelitian yaitu program ini telah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaannya dalam mencapai tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial berupa pemenuhan kebutuhan pangan. Beberapa hambatan muncul dalam pelaksanaan yaitu pencairan dana yang mundur dari tanggal semestinya yaitu tanggal 1 sehingga perlu adanya perencanaan lebih awal supaya dana cair tepat waktu. Petugas kirim yang hanya satu orang menjadi tidak efisien karena harus mengantar makanan ke 56 alamat penerima manfaat sehingga dibutuhkan adanya penambahan petugas kirim supaya lebih cepat. Belum ada peraturan yang mengatur terkait detail porsi makanan sehingga diperlukan adanya pedoman yang mengatur. Pemberian permakinan sebaiknya diiringi dengan adanya tes kesehatan secara berkala setidaknya enam bulan sekali untuk mengetahui bagaimana kesehatan para penyandang disabilitas dan apakah makanan yang diberikan masih sesuai dengan kebutuhan gizi atau perlu adanya perubahan.

**Kata kunci:** Evaluasi, Program permakinan, Penyandang disabilitas.

## **Abstract**

The Feeding Program for poor-disable citizen is an effort of the City Government of persons with disabilities who are poor / neglected. The program is given in the form of ready-to-eat food which is managed in each village and distributed to the recipient of the program every day by the sending officer. The location of this study is the Tembok Dukuh Village, Bubutan Sub-District, Surabaya City with 56 beneficiaries. The purpose of this study was to describe the evaluation of the program providing food for poor people with disabilities in the Tembok Dukuh Village, Bubutan Sub-District, Surabaya. This type of research is descriptive research with a qualitative approach. The focus of the study is based on six indicators of policy evaluation according to Dunn which include: effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, accuracy. Data analysis techniques using techniques according to Miles and Huberman. The result of this research is that this program has been running in accordance with the guidelines for its implementation in achieving its goals, namely as an effort to protect and protect social security in the form of meeting food needs. Some obstacles arise in the implementation of the disbursement of funds that are backward from the proper date, which is the 1st so there needs to be early planning so that the funds are disbursed on time. The sending staff, which was only one person, was inefficient because it had to deliver food to 56 beneficiary addresses so that additional officers were needed to make it faster. There are no regulations governing

the details of food portions, so there is a need for regulating guidelines. The provision of food should be accompanied by regular medical tests at least every six months to find out how the health of persons with disabilities and whether the food provided is still in accordance with nutritional needs or needs to be changed.

**Keywords :** Evaluation, Feeding Program, Disabilities.

## PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara, semua provinsi dan semua daerah, kemiskinan muncul karena ketidakberdayaan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (Sasmito,2019:4). Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan upaya dari pemerintah dalam mewujudkan cita-cita negara yang sesuai dengan Pancasila sila kelima yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Tingkat masalah kesejahteraan sosial di Indonesia cukup tinggi dimana hal tersebut dibuktikan dengan adanya tingkat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Indonesia yang juga sama tingginya. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat diartikan sebagai seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang tidak dapat melaksanakan fungsi sosial karena tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam hidupnya (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, 2012:4).

Kondisi PMKS di Indonesia belum sepenuhnya dapat terselesaikan. Dalam rekapitulasi data Kementerian Sosial mengenai PMKS terdapat tiga provinsi yang memiliki permasalahan yang paling besar yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut data-datanya :

**Tabel 1.1 PMKS di Indonesia Tahun 2018**

Provinsi	Jumlah	Provinsi	Jumlah
NAD	13.149	Bali	3.268
Banten	3.513	Bengkulu	7.624
DIY	7.845	DKI Jakarta	7.250
Gorontalo	959	Jambi	2.618
Jawa Barat	41.022	Jawa Tengah	21.664
Jawa Timur	35.327	Kalbar	5.152
Kalsel	4.664	Kalteng	3.437
Kaltim	5.675	Kaltara	1.084
Kep. Babel	1.409	Kep. Riau	2.609
Lampung	6.483	Maluku	1.592
Maluku Utara	788	NTB	8.568
NTT	8.512	Papua	2.116
Papua Barat	1.432	Riau	2.754
Sulbar	1.368	Sulsel	11.781
Sulteng	3.484	Sultra	4.113

Sulut	2.933	Sumbar	4.268
Sumsel	4.071	Sumut	11.473

Sumber : [www.kemensos.go.id](http://www.kemensos.go.id)

Pemerintah melaksanakan beberapa program kerja sebagai upaya dalam mengatasi adanya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berjumlah cukup banyak di Indonesia. Program kerja tersebut terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 melalui Kementerian Sosial. Program kerja tersebut dirangkum dalam 4 poin yaitu program perlindungan dan jaminan sosial, program rehabilitasi sosial, program pemberdayaan sosial, program penanganan fakir miskin. Poin-poin tersebut dilaksanakan dengan bantuan Kementerian terkait dan dengan bantuan Pemerintah Daerah untuk memantau terdistribusinya program tersebut.

Berdasarkan data keseluruhan PMKS yang ada di Indonesia, penyandang disabilitas merupakan salah satu kriteria yang menjadi sorotan pemerintah. Menurut Kepala Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik, Kementerian Sosial, Erniyanto menunjukkan sebanyak 21,8 juta atau sekitar 8,56% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Data tersebut diambil dari Survei Penduduk Antar Sensus atau SUPAS 2015. (Tempo.2019)

Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental yang dapat mengganggu atau menjadikannya sebagai hambatan dan rintangan dalam melakukan kegiatan secara bagaimanawajarnya (Soleh, 2014:7). Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan, penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika kita berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Oleh karena itu, penyandang disabilitas seringkali mengalami kesulitan dalam

menjalankan aktifitas di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa kesulitan yang dialami penyandang disabilitas diantaranya yaitu bekerja atau untuk melakukan kegiatannya sehari – hari yang biasa dilakukan manusia normal pada umumnya.

Penyandang disabilitas dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Pembagian beberapa kategori bagi penyandang disabilitas yang pertama adalah cacat tubuh; yaitu kekurangan atau cacat yang ada pada tubuh seorang penderita, yang kedua cacat mental; yaitu kekurangan yang lebih cenderung pada pola pemikiran seorang penderita, dan yang ketiga; yaitu cacat tubuh dan mental atau cacat ganda, adalah kekurangan yang diderita oleh penyandang pada kedua bagian yaitu tubuh dan pikiran atau mental (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat;1997:4).

Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama sebagaimana hak yang dimiliki orang lain, yaitu hak ekososial (ekonomi,sosial,budaya) dimana hak tersebut merupakan kewajiban bagi pemerintah untuk memenuhinya karena keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang tersebut (Thohari, 2014:32). Penyandang disabilitas di dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh diperlakukan tidak adil karena setiap hak-hak disabilitas dilindungi oleh peraturan perundang-undangan seperti pada Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat pada pasal 6 yaitu mengenai hak-hak yang dimiliki penyandang disabilitas. Hak tersebut juga berlaku bagi penyandang disabilitas yang terlantar dan tidak memiliki keluarga sehingga tidak diperlakukan orang secara semena-mena

Adanya penyandang disabilitas yang miskin dan terlantar merupakan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan tugasnya.. Hal tersebut sesuai dengan tujuan adanya pelaksanaan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama (Undang-Undang Nomor 4, 1997). Dalam undang – undang tersebut juga disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu. Tujuan dari bantuan tersebut adalah agar mereka dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan sebagai

upaya pemerintah untuk memelihara keseimbangan sosial yang bersifat terus menerus supaya penyandang disabilitas dapat menjalankan kehidupan yang wajar. Bantuan kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang disabilitas sangatlah penting. Hal tersebut membuat masyarakat penyandang disabilitas dapat merasakan pelayanan dari negara khususnya pemerintah kabupaten/kota sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk memelihara masyarakatnya melalui program-program pemberdayaan sebagai penerapan dari otonomi daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur tahun 2017 menunjukkan bahwa disabilitas merupakan kriteria PMKS yang berjumlah paling banyak yaitu 124.662 jiwa. Seperti di salah satu kota di Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, terdapat 6.514 jiwa penyandang disabilitas dari keseluruhan penduduk yaitu sekitar 2,89 juta penduduk. Hal tersebut menjadi pekerjaan khusus bagi pemerintah karena penyandang disabilitas yang miskin dan terlantar adalah tanggungjawab pemerintah.

Penyandang disabilitas menjadi jenis PMKS yang menduduki peringkat kedua terbanyak di Kota Surabaya setelah PMKS lanjut usia sehingga perlu perhatian khusus untuk pemerintah mengatasi hal tersebut. Penyandang disabilitas merupakan lapisan masyarakat yang rawan kemiskinan karena mengingat keterbatasan yang mereka miliki. Penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama seperti manusia normal untuk berpartisipasi dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan, budaya maupun politik di masyarakat (Ningsih, 2014:72)

Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Dinas Sosial Kota Surabaya memiliki cara sendiri dalam menangani permasalahan sosial atau PMKS tersebut. Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial berusaha menangani permasalahan PMKS dengan beberapa program, diantaranya adalah program permakanaan dengan sasaran penyandang disabilitas. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya pada tanggal 13 Juni 2016. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka membantu menyejahterakan masyarakat. Tidak terkecuali bagi penyandang cacat atau disabilitas yang berada dalam

kondisi ekonomi yang berada dibawah garis kemiskinan berdasarkan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya. Program ini bernama program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas yang miskin di Kota Surabaya. Permakanan yang dimaksud adalah dengan memberi jatah makan kepada penerima program atau dalam hal ini adalah penyandang disabilitas yang miskin sesuai dengan menu dan jadwal yang telah ditentukan.

Pelaksana program pemberian permakanan ini yaitu kelompok masyarakat dan petugas kirim. Kelompok masyarakat yang dimaksud adalah beberapa orang yang berada di suatu lingkup kelurahan yang memiliki rasa sosial yang tinggi sehingga mau dan mampu melaksanakan tugas. Kelompok masyarakat tersebut menyampaikan kesanggupannya melalui surat yang ditanda-tangani dan ditujukan kepada Dinas Sosial melalui pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya kelompok masyarakat disebut sebagai Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM). Surat keterangan tersebut juga berlaku bagi petugas kirim. IPSM bertugas untuk mengelola anggaran dana yang diberikan oleh Dinas Sosial untuk kemudian disampaikan kepada penerima program oleh petugas kirim. IPSM juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas anggaran dana yang sudah diberikan. Petugas kirim juga bertugas untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi jumlah makanan yang diberikan dan menunya apa saja.

Pelaksanaan awalnya, anggaran yang diberikan untuk penerima program yaitu sekitar Rp. 4.000,00 per orang pada tahun 2013. Seiring perkembangannya, nominal tersebut terus meningkat sehingga pada tahun 2015 berubah menjadi Rp. 11.000,00 per orang dan berlangsung hingga saat ini. Revisi yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya semata-mata dilaksanakan untuk memenuhi gizi penerima program mengingat dari tahun ke tahun harga bahan pokok semakin tinggi.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Permakanan di Kota Surabaya juga mengatur hal-hal terkait laporan pertanggungjawaban yang harus diberikan seluruh pelaksana program supaya program bisa dievaluasi sehingga dapat terus menerus lebih

baik. Program pemberian permakanan diberikan kepada seluruh masyarakat yang termasuk dalam kategori sasaran program yaitu penyandang disabilitas yang miskin. Hingga April 2020 tercatat 6.383 penerima program yang tersebar di 31 kecamatan di Kota Surabaya. Berikut datanya

**Tabel 1.2 Jumlah Penerima Program Pemberian Permakanan di Kota Surabaya per Januari 2020**

Kota Surabaya			
Kecamatan	Penerima	Kecamatan	Penerima
Wilayah Utara			
Bulak	136	Pabean Cantika	173
Kenjeran	246	Kremlangan	199
Semampir	368		
Wilayah Selatan			
Wonokromo	393	Karang Pilang	112
Wonocolo	154	Jambangan	113
Gayungan	41	Dukuh Pakis	88
Wiyung	146	Sawahan	568
Wilayah Timur			
Gubeng	222	Mulyorejo	115
Gunung Anyar	111	Rungkut	194
Sukolilo	174	T. Mejoyo	163
Tambaksari	542		
Wilayah Barat			
Benowo		Tandes	207
Pakal	133	Sambikerep	72
Asemrowo	151	Lakarsantri	275
Sukomanunggal	109		
Wilayah Pusat			
Tegalsari	260	Genteng	222
Simokerto	315	Bubutan	222

Sumber : Dinas Sosial Kota Surabaya

Kecamatan yang berada di wilayah Surabaya Pusat terdapat 4 kecamatan yaitu Kecamatan Tegalsari, Simokerto, Genteng, Bubutan. Salah satu kecamatan tersebut diantaranya terdapat Kecamatan Bubutan, yang di dalamnya terdapat kelurahan yang memiliki sekitar 30% dari keseluruhan warga yang termasuk ke dalam masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yaitu Kelurahan Tembok Dukuh. Masyarakat tersebut diantaranya terdapat penyandang disabilitas yang

miskin sehingga membutuhkan perhatian pemerintah. Kelurahan Tembok Dukuh memiliki 56 orang penyandang disabilitas yang merupakan penerima program pemberian permakanaan ini.

Berdasarkan data Kelurahan Tembok Dukuh memiliki 27.669 jiwa yang berdomisili di Kelurahan Tembok Dukuh dengan penduduk laki-laki sekitar 13.704 jiwa dan perempuan sebanyak 13.995 jiwa. Sumber yang sama juga memuat bahwa dari seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut, yang memiliki KTP Surabaya sekitar 8.829 jiwa. Kelurahan Tembok Dukuh terbagi menjadi 10 RW dan 99 RT.

Beberapa kendala pelaksanaan program pemberian permakanaan ditemukan di Kelurahan Tembok Dukuh dimana menu makanan yang diberikan terkadang masih kurang sesuai dengan peraturan yaitu makanan harus mengandung nasi, sayur, lauk dan buah. Selain itu jam pengantaran yang masih belum bisa teratur karena mengingat wilayah Kelurahan Tembok Dukuh yang luas sehingga petugas kirim tidak bisa melakukan secara bersamaan sekaligus dan harus dilakukan bertahap.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai evaluasi program pemberian permakanaan ini. Adapun judul penelitian ini adalah “Evaluasi Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas yang Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn. Subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif berdasarkan konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Penelitian ini menggunakan beberapa informan sebagai narasumber dan didukung dengan beberapa data sekunder. Beberapa informan tersebut

yaitu perwakilan dari bagian pemberian permakanaan di Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu Ibu Pretty, Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Kelurahan Tembok Dukuh yaitu Ibu Tarni, Ketua Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) yaitu Bapak Hastayani, Bapak Aji Santoso selaku petugas kirim, Ibu Rodiyah selaku relawan memasak, dan dua orang dari keluarga penyandang disabilitas penerima program yaitu orang tua dari Mochammad Faruq dan keluarga Azizah Agustina. Data sekunder yang diperoleh yaitu berupa laporan pertanggungjawaban oleh Ketua IPSM, data penerima manfaat, daftar menu makanan selama satu bulan dan perincian anggaran dana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Program Pemberian Permakanan di Kota Surabaya merupakan program Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya penyandang disabilitas yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Surabaya No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya. Program ini ditujukan untuk lanjut usia, anak terlantar, dan penyandang disabilitas miskin yang dibuktikan dengan ia/keluarganya termasuk ke dalam data Pemerintah Kota Surabaya sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Makanan yang diberikan berupa makanan siap makan setiap hari sekali. Makanan tersebut seharga Rp 11.000,00. Pelaksana Program ini merupakan Dinas Sosial Kota Surabaya yang dibantu dengan Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat di tingkat kelurahan. Program ini didistribusikan ke seluruh kecamatan dan kelurahan di Surabaya, termasuk di Kelurahan Tembok Dukuh.

Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) di Kelurahan Tembok Dukuh terdiri atas Ketua IPSM yang bernama Bapak Hastayani, Bendahara IPSM yaitu Bapak Roby Era Indayuni. Petugas kirim di Kelurahan Tembok Dukuh yaitu Bapak Aji Santoso. IPSM juga dibantu oleh seorang relawan memasak yang membantu mengolah makanan yaitu Ibu Rodiyah. Keseluruhan pengurus berdomisili di Kelurahan Tembok Dukuh.

Kelurahan Tembok Dukuh memiliki penerima program sebanyak 56 orang. Masing-masing penerima program tersebut mendapatkan makanan siap makan senilai Rp 11.000,00 setiap hari. Anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan ini

diberikan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya setiap bulan, sehingga jika di total keseluruhan, anggaran yang diberikan sebesar Rp 18.480.000,00. Anggaran tersebut diberikan kepada IPSM melalui transfer ke rekening Bank Jatim yang di atasnamakan Ketua IPSM dan Bendahara.

Menu makanan yang diberikan berbeda dalam 10 hari, lalu pada hari ke 11 kembali lagi ke menu nomor satu, sehingga dalam 30 hari penerima program menerima menu yang sama sebanyak 3 kali, lalu pada hari ke-31 biasanya diambilkan dari menu hari kelima. Adapun menu dalam 10 hari tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3 Menu Makanan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Tembok Dukuh**

Hari ke-	Menu Makanan	Hari Ke-	Menu Makanan
1	Nasi putih Ayam goreng kremes Tempe goreng Sayur sup Buah melon Air mineral	6	Nasi putih Ayam bumbu rujak Tempe goreng Urap sayuran Buah semangka Air Mineral
2	Nasi putih Krengsengan daging Tahu goreng Tumis tauge Buah pepaya Air mineral	7	Nasi putih Ayam goreng Tempe goreng Bobor daun singkong Buah papaya Air mineral
3	Nasi putih Bandeng presto Tempe goreng Sayur Lodeh Buah semangka Air mineral	8	Nasi putih Pepes ikan Dadar jagung Sayur bening Buah papaya Air mineral
4	Nasi putih Bali telur Bali tahu Pecel sayur Buah papaya Air mineral	9	Nasi putih Rawon daging Tauge pendek+ kerupuk+sambal Buah melon Air mineral
5	Nasi putih Ikan goreng Oseng tahu Sayur asem	10	Nasi putih Soto ayam Kubis+tauge+ Sun+sambal

Buah melon Air mineral	Buah papaya Air mineral
---------------------------	----------------------------

Sumber : IPSM Kelurahan Tembok Dukuh

Pelaksana program ini yaitu Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) yang dibantu dengan satu orang petugas kirim. IPSM terdiri dari Ketua, sekretaris, dan bendahara. IPSM dan petugas kirim diajukan sesuai dengan ketersediaan dan kemampuan mereka yang kemudian dibuktikan dalam bentuk surat yang menyatakan bahwa mereka bersedia dan sanggup melaksanakan program ini secara sukarela. Petiugas kirim adalah orang yang bertugas mengirimkan makanan ke penerima program dan untuk mengapresiasi tugasnya, pemerintah memberikan honor kepada petugas kirim. IPSM dalam melaksanakan program juga dibantu dengan relawan memasak makanan yang membantu mengolah bahan makanan menjadi makanan yang siap makan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka dapat dilakukan analisis Evaluasi Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas yang Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn(dalam Riant Nugroho, 2009:537). Teori tersebut meliputi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Berikut merupakan uraian indikator-indikator teori tersebut:

#### 1. Efektifitas

Efektifitas erat kaitannya dengan hasil dan kegunaan. Efektifitas juga identik dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang terjadi sesungguhnya. Apabila suatu kebijakan telah dilaksanakan tetapi tetap tidak mampu memecahkan permasalahan maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut gagal, tetapi pada keadaan tertentu kebijakan tidak dapat langsung efektif dalam jangka pendek sehingga dibutuhkan waktu tertentu supaya kebijakan tersebut dapat memberikan efek. Umumnya kebijakan semacam ini bersifat kontinyu atau berkelanjutan sehingga dampaknya tidak dapat dirasakan langsung. (Wowiling, 2018:8). Efektifitas dapat diukur berdasarkan apakah program tersebut sudah berjalan sesuai dengan

tujuan yang diinginkan dan apa sajakah yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait sebagai upaya tercapainya tujuan dari suatu kebijakan tersebut.

Peraturan Walikota Surabaya No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Permakanan tertulis bahwa tujuan dari program ini adalah sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan bagi fakir miskin/terlantar. Adapun pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan yang dimaksud adalah dengan memberikan makanan yang layak dan memenuhi kebutuhan gizi 4 sehat 5 sempurna setidaknya dalam satu hari sekali.

Pelaksanaan program permakanan bagi penyandang disabilitas di Kelurahan Tembok Dukuh sudah berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan dalam mencapai tujuan. Hal tersebut dibuktikan dengan dampak yang dirasakan oleh para penerima program dimana mereka merasa terbantu dengan adanya program ini. Penghasilan para penerima program yang biasanya digunakan untuk membeli makanan dapat mereka alokasikan untuk kebutuhan lain karena adanya program permakanan ini. Program ini juga membawa perubahan yang positif dimana penyandang disabilitas juga merasa dipedulikan oleh pemerintah dan memiliki semangat dalam menjalani kehidupan sehingga angka harapan hidup dari penyandang disabilitas miskin pun meningkat.

Pelaksanaan program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas apabila dikaitkan dengan kriteria efektifitas maka dapat dikatakan sudah efektif karena melalui program ini, pemerintah dapat mengurangi angka kelaparan pada penyandang disabilitas yang miskin dan atau terlantar.

## **2. Efisiensi**

Efisiensi biasanya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya secara optimal dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa sumber daya anggaran dan sumber daya manusia yang mendukung pelaksana dalam mencapai tujuan kebijakan (Aisyah, dkk, 2017:3). Pemanfaatan kedua sumber daya tersebut harus dilakukan

secara oprimal sehingga dapat tercapai efisiensi dalam pelaksanaan program.

Pada awal pelaksanaannya, program permakanan ini dilakukan oleh Dinas Sosial yang menentukan siapa saja yang akan menjadi sasaran program. Adapun kriteria penerima program yaitu penyandang disabilitas yang ber-KTP Surabaya dan ia/keluarganya masuk ke dalam daftar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Surabaya. Upaya selanjutnya, Dinas Sosial meminta kelurahan supaya membentuk masing-masing IPSM yang mau dan mampu melaksanakan program ini. Kemudian IPSM tersebut diberikan Surat Keterangan (SK) untuk melaksanakan program tersebut.

Kriteria efisiensi yang kedua yaitu pengelolaan sumber daya anggaran. Dana yang digunakan untuk program permakanan ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya kemudian diberikan kepada IPSM lalu dikelola menjadi makanan yang siap dibagikan kepada sasaran program. Anggaran yang diberikan yaitu sebesar Rp11.000,00 per orang.per hari. Dinas Sosial memberikannya setiap bulan sehingga setiap bulannya IPSM menerima sebesar Rp 18.480.000,00

Dalam pencairannya, Dinas Sosial mengirimkan melalui rekening Bank Jatim yang di atasnamakan Ketua dan Bendahara IPSM sehingga dapat meminimalisir adanya korupsi dan sejenisnya. Proses pencairan ini terkadang bisa tertunda seperti yang seharusnya pada tanggal 1 setiap bulan menjadi mundur di tanggal 5 atau 6. Hal tersebut menyebabkan defisit anggaran IPSM karena permakanan yang diberikan berlangsung setiap hari dan tidak berhenti kecuali di hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri. Untuk menyiasati anggaran yang terlambat cair, IPSM memanfaatkan kas yang mereka miliki sebagai dana talangan untuk tetap melakukan kegiatan pemberian permakanan karena kegiatan permakanan harus tetap berjalan setiap hari. Selanjutnya apabila anggaran program pemberian permakanan sudah cair maka sebagian digunakan untuk mengembalikan dana talangan yang digunakan untuk pemberian

perumahan sebelumnya. Anggaran yang diberikan oleh Dinas Sosial setiap bulannya wajib dipertanggungjawabkan oleh Ketua IPSM melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang diberikan kepada Dinas Sosial di setiap pertemuan evaluasi di Gedung Dinas Sosial Kota Surabaya setiap bulan.

Anggaran yang diberikan untuk program ini dapat dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan untuk memasak sesuai dengan menu yang sudah ditentukan. Terdapat saat-saat tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri atau musim kemarau, yang menyebabkan harga bahan pokok naik, membuat Ketua IPSM khawatir apabila menu yang dimasak tidak maksimal karena harga bahan yang melonjak tetapi anggaran yang diberikan tetap sehingga beliau berharap apabila ada kenaikan anggaran. Menurut Ibu Rodiyah selaku relawan yang memasak, Apabila terjadi kenaikan harga biasanya disiasati dengan mengurangi porsi yang diberikan kepada sasaran program karena anggaran yang tetap tetapi harga bahan pokok yang melonjak. Pengurangan porsi tersebut dilakukan dengan tanpa mengurangi macam makanan yang diberikan. Hal tersebut dapat dilakukan karena belum ada ketentuan yang membahas lebih detail mengenai porsi makanannya. Porsi yang dimaksud dalam hal ini adalah berapa gram makanan yang diberikan. Detail porsi tersebut juga harapannya dapat membantu mengontrol nilai gizi yang terkandung didalamnya. Sejauh ini, evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait hanya membahas mengenai menu makanan yang diberikan sesuai atau tidak dengan menu yang sudah direkomendasikan. Mengenai gizi atau porsi tidak dibahas secara mendetail karena apabila variasi menu sudah dipenuhi maka dapat dikatakan sudah sesuai dengan pedoman, mengingat pedoman pelaksanaan juga tidak membahas mengenai detail porsi.

Kriteria selanjutnya yaitu dalam hal pemanfaatan sumber daya manusia yang mengelola program. Petugas kirim merupakan petugas yang memiliki tugas mengirim makanan dari relawan pemasak kepada masing-masing sasaran program. Petugas kirim dalam

melaksanakan tugasnya juga mendapat honor dari Dinas Sosial yang langsung dikirim ke rekening tabungan Bank Jatim atas nama pribadi beliau. Kelurahan Tembok Dukuh memiliki penerima program sebanyak 56 jiwa dengan alamat yang berbeda-beda dan tersebar di seluruh wilayah Kelurahan Tembok Dukuh. Hal tersebut menjadi permasalahan karena petugas kirim yang hanya satu orang harus mengirim ke semua penerima program yang berjumlah 56 jiwa sehingga kurang efisien. Menurut Bapak Aji Santoso selaku petugas kirim, beliau selama ini mengantarkan satu per satu mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB atau bisa lebih. Menurut beliau apabila diberikan waktu dua jam atau lebih beliau tidak keberatan, tetapi apabila harus dipersingkat menjadi satu jam beliau merasa keberatan karena mengingat rute yang banyak. Oleh karena itu, dapat dipertimbangkan adanya penambahan petugas kirim sehingga dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

Adanya waktu yang tetap yaitu pukul 07.00 WIB – 09.00 WIB dalam pengantaran makanan oleh petugas kirim di Kelurahan Tembok Dukuh dapat dikatakan lebih baik jika dibandingkan dengan yang terjadi di Kelurahan Krembangan Utara sebagaimana yang tertulis pada penelitian terdahulu yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Perumahan di Kelurahan Krembangan Utara” yaitu belum terdapat waktu pengantaran yang pasti sehingga membingungkan para penerima manfaat. (Ramadhan, 2018:10)

Makanan yang diantarkan dikemas menggunakan kotak makan plastik yang dapat digunakan lebih dari sekali sehingga dapat menghemat biaya dan tidak menyebabkan sampah. Ketika petugas kirim mengirim makanan hari ini, beliau juga sekaligus mengambil kotak makan yang digunakan untuk tempat makanan kemarin. Jadi IPSM menggunakan kotak makan ganda. . Kotak makan ini merupakan kotak makan yang dibeli di awal pelaksanaan program menggunakan anggaran yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Surabaya sehingga untuk selanjutnya dapat menggunakan kotak makan tersebut secara terus menerus.



Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan yang sudah dipaparkan diatas, apabila dikaitkan dengan kriteria efisiensi maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Tembok Dukuh kurang efisien. Dalam segi upaya yang dilakukan sudah maksimal, tetapi pada proses pengelolaan anggaran Program Pemberian Permakanan belum efisien karena proses pencairan dana yang tidak tepat waktu yaitu yang seharusnya pada tanggal 1 menjadi mundur beberapa hari. Hal tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu berlangsungnya pemberian permakanan yang dilakukan setiap hari. Petugas kirim yang hanya satu juga dirasa kurang karena mengingat jumlah alamat yang dituju banyak yaitu 56 orang sehingga membutuhkan waktu lebih lama.

### 3. Kecukupan

Kriteria kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah. Kriteria ini juga menekankan seberapa kuat hubungan antara alternative kebijakan dengan hasil yang dicapai (Eriza, 2015:7)

Program pemberian permakanan diberikan kepada penyandang disabilitas yang miskin/terlantar dengan indikator penyandang disabilitas tersebut harus terdaftar ke dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Surabaya. Adanya program ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan sosial berupa pemenuhan kebutuhan dasar yaitu pangan. Adapun penerima program ini yaitu 56 jiwa penyandang disabilitas. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu dimana dikatakan bahwa program pemberian permakanan ini telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana program ini dapat mengurangi angka kelaparan yang terjadi di masyarakat, juga dapat meningkatkan angka harapan hidup para penyandang disabilitas yang hidupnya bergantung pada orang lain.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, keluarga sasaran program mengatakan, dengan adanya Program Pemberian Permakanan ini, keluarga penyandang disabilitas yang termasuk

ke dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merasa sangat terbantu dalam hal kebutuhan pangan. Adanya program ini membuat mereka tidak perlu khawatir terkait gizi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas karena setidaknya sehari sekali mereka mendapat asupan makanan yang mengandung gizi dengan unsur 4 sehat 5 sempurna.

Berdasarkan temuan peneliti yang sudah dipaparkan diatas, maka dalam kriteria kecukupan pelaksanaan program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Tembok Dukuh dapat dikatakan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sasaran program yaitu dalam hal ini adalah penyandang disabilitas.

### 4. Perataan

Perataan dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai keadilan penyebaran suatu kebijakan publik berikut dengan manfaatnya. Menurut Dunn, kriteria perataan erat kaitannya dengan terdistribusinya manfaat suatu kebijakan kepada kelompok sasaran secara menyeluruh. Kriteria perataan dapat melihat apakah suatu hasil dari kebijakan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelompok sasaran. (Wahyu, 2018:8)

Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas yang Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh pada kriteria perataan dapat dilihat dari seberapa besar pengaruh dan manfaat program ini dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu penyandang disabilitas yang miskin di Kelurahan Tembok Dukuh.

Menurut orang tua dari salah satu penyandang disabilitas yang bernama Muhammad Faruq. Beliau mengatakan bahwa dengan adanya program ini, beliau sedikit terbantu karena setidaknya dalam satu hari Faruq dapat merasakan makanan yang bergizi dan layak sehingga orang tuanya tidak perlu khawatir terkait gizi yang harus dikonsumsi oleh Faruq karena mengingat Faruq yang masih berusia 12 tahun sehingga membutuhkan gizi untuk pertumbuhannya. Menurut keluarga lain, seperti keluarga Azizah Agustina. Beliau mengharapkan agar pemberian permakanan ini tidak hanya diberikan satu hari sekali tetapi dapat ditambah

menjadi dua kali sehari supaya dapat lebih maksimal.

Menurut Bapak Hastayani selaku Ketua IPSM Kelurahan Tembok Duku mengatakan bahwa sasaran program ini adalah penyandang disabilitas yang keluarganya termasuk ke dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan hingga kini keseluruhan penyandang disabilitas yang tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sudah terdaftar sebagai penerima program pemberian permakanan ini.

Berdasarkan paparan diatas, program permakanan ini dapat dikatakan sudah merata ke seluruh penerima program tetapi perlu adanya perbaikan berupa porsi yang diperbanyak atau intensitas pemberiannya ditambah sehingga manfaat dari program ini dapat lebih dirasakan lagi.

#### **5. Responsivitas**

Responsivitas dapat dikatakan sebagai kriteria yang berkenaan dengan apakah hasil dari kebijakan telah memuat nilai dan atau preferensi dari suatu kelompok masyarakat dan dapat memberikan kepuasan kepada mereka. Dalam hal ini, dapat dilihat melalui bagaimana respon dan tanggapan masyarakat terkait diterapkannya kebijakan tersebut. (Franky, 2019:4)

Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas yang Miskin di Kelurahan Tembok Duku mendapat respon yang baik dan positif dari berbagai pihak, mulai dari pelaksana program hingga sasaran program. Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai pelaksana program memberikan respon yang baik dan positif. Kelurahan Tembok Duku dan perangkatnya pun juga memberikan respon yang sama. Hal tersebut dibuktikan dengan bagaimana mereka menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya meskipun di beberapa aspek masih ada hal yang perlu diperbaiki. Hal tersebut juga didukung dengan upaya Dinas Sosial yang selalu melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan baik dengan seluruh pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Setiap bulannya pihak-pihak yang terkait dengan program ini juga melakukan evaluasi guna meningkatkan dan mengatasi kendala-kendala apa saja yang terjadi selama pelaksanaan program. Kendala tersebut

diantaranya yaitu adanya keterlambatan terkait pencairan anggaran yang digunakan untuk operasional program. Hal tersebut direspon oleh Dinas Sosial dengan menjelaskan mengapa keterlambatan tersebut bisa terjadi dan mengupayakan supaya keterlambatan tidak terjadi lagi di bulan selanjutnya, tetapi keterlambatan masih terjadi lagi. Ketua IPSM yaitu Bapak Hastayani juga menyampaikan bahwa mengenai adanya lonjakan harga juga dibahas di rapat evaluasi tetapi untuk menaikkan anggaran perlu adanya pengkajian ulang oleh pihak-pihak terkait.

Respon yang positif juga diberikan oleh para penerima program yaitu penyandang disabilitas yang miskin khususnya di Kelurahan Tembok Duku. Menurut penuturan petugas kirim yaitu Bapak Aji Santoso di Kelurahan Tembok Duku, setiap beliau mengantarkan makanan selalu disambut dengan baik oleh para penerima program dan mereka terlihat bahagia setiap hari. Keluarga penerima program juga memberikan respon positif karena merasa terbantu dengan adanya program ini.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan yang telah dipaparkan di atas, pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas di Kelurahan Tembok Duku dalam kriteria responsivitas maka dapat dikatakan bahwa respon yang diberikan oleh pihak-pihak terkait sangat baik. Hal tersebut dibuktikan dengan respon yang diberikan oleh pelaksana program dan sasaran program. IPSM sebagai pelaksana di lapangan juga melakukan dengan baik tugasnya sehingga pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya dan dapat mengatasi kendala-kendala yang ada.

#### **6. Ketepatan**

Ketepatan adalah kriteria yang sangat berhubungan dengan rasionalitas dan substansi atau sebab-akibat karena ketepatan tidak hanya berkenaan dengan satuan kriteria saja tetapi juga dengan dua atau lebih kriteria lainnya. Ketepatan merujuk pada nilai dari tujuan-tujuan program dan seberapa kuat asumsi yang melandasi tujuan program tersebut. (Halisa, 2019:5)

Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas yang Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh dapat dikatakan sudah tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang mengaturnya yaitu Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kota Surabaya menyebutkan bahwa sasaran programnya adalah penyandang disabilitas yang miskin dan atau terlantar yang dibuktikan dengan terdaftarnya keluarga tersebut ke dalam data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Program yang dilaksanakan di Kelurahan Tembok Dukuh memiliki sasaran program yang tepat yaitu penyandang disabilitas yang miskin dan atau terlantar yang telah dibuktikan dengan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan pedoman pelaksanaan. Program pemberian permakanan ini diberikan dengan harapan dapat membantu penerima program dalam hal kebutuhan pangan sehingga penerima program dapat terhindar dari kelaparan.

Peraturan Walikota tersebut juga mengatur bagaimana makanan yang diberikan kepada penerima program, seperti pada pasal 11 ayat 1 disebutkan bahwa apabila terdapat pantangan kesehatan maka standard makanan diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat, tetapi di Kelurahan Tembok Dukuh terdapat seorang penerima manfaat yaitu Ibu Suri yang seharusnya mendapatkan makanan berupa bubur. Oleh karena penerima bubur hanya satu orang saja, akhirnya disamaratakan menjadi nasi saja. Hal tersebut sangat disayangkan karena dikhawatirkan penerima program tidak dapat merasakan manfaat dengan maksimal. Menurut penuturan keluarga, kondisi kesehatan beliau sekarang sudah lebih membaik daripada sebelumnya, tetapi keterangan tersebut hanya berdasarkan apa yang terlihat saja dan tanpa surat keterangan dokter. Berdasarkan hal tersebut sebaiknya dilakukan juga pengecekan kesehatan secara berkala oleh dokter puskesmas untuk mengetahui perkembangan kesehatan para

penerima program. Setidaknya dilakukan per enam bulan sekali.

Berdasarkan kriteria ketepatan, program pemberian permakanan bagi penyandang disabilitas yang miskin di Kelurahan Tembok Dukuh sudah tepat sasaran karena keseluruhan penerima program telah terdaftar sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) tetapi pada poin makanan, masih terdapat yang tidak tepat sasaran sehingga masih perlu adanya perbaikan.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Evaluasi Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas yang Miskin di Kelurahan Tembok Dukuh menggunakan kriteria evaluasi kebijakan menurut Dunn yang terdiri atas enam indikator. Efektifitas dari program ini telah berjalan sesuai dengan tujuan program yaitu untuk pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi pemberian permakanan masih diberikan hanya sebanyak satu kali sehari, kedepannya diharapkan adanya peningkatan sehingga menjadi sehari tiga kali. Efisiensi yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran telah dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Makanan yang diberikan juga dikemas menggunakan kotak makan plastik sehingga dapat digunakan berkali-kali. Sayangnya pencairan anggaran masih terjadi keterlambatan sehingga digunakan dana talangan untuk melanjutkan kegiatan pemberian permakanan meskipun anggarannya belum turun. Petugas kirim yang hanya satu juga membuat pengantaran makanan membutuhkan waktu setidaknya dua jam atau lebih untuk mengantar makanan. Kecukupan pada program ini pada saat-saat tertentu tidak dapat maksimal karena terjadinya lonjakan harga dari bahan pokok yang akan dikelola sehingga harus disiasati dengan porsi yang sedikit dikurangi. Perataan pada program ini juga sudah merata ke seluruh penerima program yang sesuai dengan kategori penerima program. Responsivitas pada program ini juga positif dari seluruh pihak terkait sehingga berjalannya program dapat terus menerus mengalami perbaikan. Ketepatan dari program ini telah tepat sasaran tetapi pada poin menu makanan masih belum karena adanya seorang

penerima yang seharusnya mendapat bubur tetapi diberi nasi karena hanya satu orang saja. Guna mengetahui kondisi kesehatan penerima program, diperlukan adanya tes kesehatan secara berkala kepada penerima program supaya dapat diketahui apa makanan tersebut masih cocok diberikan atau harus diperbarui.

Berdasarkan apa yang sudah diuraikan diatas, pelaksanaan Program Pemberian Perumahan bagi Penyandang Disabilitas yang Miskin dan Terlantar di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya telah berjalan cukup baik. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) selaku pelaksana program telah melakukan tugasnya dengan baik, penyandang disabilitas sebagai penerima program juga telah merasakan manfaat dari program ini. Akan tetapi, ada beberapa kendala yang masih harus diperhatikan dan diperbaiki lagi. Kendala tersebut seperti pencairan dana yang tidak tepat waktu, ketepatan waktu pengantaran, harga bahan pokok yang melonjak sehingga membuat relawan masak harus menyiasati dengan mengurangi porsi tetapi tetap dengan varian masakan yang sama, dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan penerima program.

### Saran

Berdasarkan pemaparan peneliti mengenai hasil dari penelitian yang berjudul Evaluasi Program Pemberian Perumahan bagi penyandang disabilitas yang miskin di Kelurahan Tembok Dukuh di atas, maka sebagai upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki program, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Supaya proses pencairan anggaran dapat dilakukan tepat waktu dan tidak menghambat pelaksanaan program, maka proses perencanaan anggaran oleh Dinas Sosial Kota Surabaya dapat dilakukan sebelum tanggal 1 sehingga dapat langsung cair pada tanggal 1.
2. Penerima program yang berjumlah 56 orang sehingga alamat tujuan pengantaran juga sebanyak 56 alamat, maka perlu dipertimbangkan adanya penambahan personil petugas kirim sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mengantar menjadi lebih cepat dan efisien.
3. Perlu adanya ketentuan yang mengatur terkait detail porsi yaitu dalam gram dari makanan yang

diberikan sehingga nilai gizi dari makanan yang diberikan dapat lebih memenuhi kebutuhan penerima program.

4. Perlu dilakukan tes kesehatan secara berkala setidaknya enam bulan sekali kepada para penyandang disabilitas penerima program sehingga dapat diperbarui menu makanan apabila dirasa menu tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas tersebut.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan artikel ini, antara lain :

1. Seluruh dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Indah Prabawati, S. Sos.,M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi dan dosen penasehat akademik.
3. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si, selaku dosen penguji dalam seminar proposal maupun penilaian artikel.
4. Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A, selaku Dosen Penguji dalam seminar proposal maupun penilaian.
5. Dan pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Siti, dkk. 2017. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman". *Journal of Public Sector Innovation*. Vol. 2 (1): hal 3 (Online), (<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/2238/1439>), Diunduh pada 15 Mei 2020.
- Anshori, WAW. 2017. "Evaluasi Kebijakan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Blora". *Journal Of Public Policy And Management Review*. Vol. 6(4). Hal: 8. (Online)(<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/17821>). Diunduh pada 29 April 2020.
- Awang,Niga, Frengky. 2019. "Evaluasi Program Desa Mandiri Anggur Merah (Anggaran Rakyat Menuju Sejahtera) di Kecamatan

- Lamboya Kabupaten Sumba. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 1(1). Hal: 4. (Online)(<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/5220>). Diunduh pada 29 April 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2019. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jawa Timur tahun 2018. (online). (<https://jatim.bps.go.id/statictable/2019/10/16/2044/penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur/>) diakses pada tanggal 20 November 2019 pukul 19.18
- Eriza, Alfiorina Heru. 2015. “Evaluasi Program Rehabilitasi Sosial Daerah Kumuh (RSDK) Dalam kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kelurahan Wonorejo Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya”. *Journal Of Public Sector Innovation*. Vol.3(7).Hal:7.(Online)(<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/12606>). diunduh pada tanggal 14 Juli 2020.
- Ningsih. 2014. “Mainstreaming Isu Disabilitas Di Masyarakat Dalam Kegiatan Penelitian Maupun Pengabdian Masyarakat Di STAIN Kudus”. *Directory Open Of Access Journal*. Hal: 72. (Online) (<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/1342>). Diunduh pada 24 April 2020.
- Nugroho, Riant. 2009. Public Policy (Edisi revisi). Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 537.
- Pahriati, Halisa. 2019. “Evaluasi Pencapaian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Tinjau Dari Aspek Ketepatan di Kelurahan Pembataan Kabupaten Tabalong. *Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis*. Vol. 2(2). Hal: 5. (Online)(<https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/208>). Diunduh pada 23 April 2020.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Permakanan di Kota Surabaya.
- Ramadhan, Gilang. 2018. “Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberian Permakanan di Kelurahan Krebangan Utara Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya. Hal: 10 (Online)(<http://repository.unair.ac.id/79172/>). Diunduh pada tanggal 13 juli 2020.
- Sasmito, Cahyo. 2019. “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Batu”. *Journal Of Public Sector Innovation* Vol.3(2).Hal:4.(Online)(<https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpsi/article/view/4847>). Diunduh pada tanggal 14 Juli 2020.
- Soleh, Akhmad. 2014. “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Penyandang Disabilitas”. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 3. Hal. 7. (Online) (<http://ejournal.uinsuka.ac.id/tarbiyah/JPI/article/view/1155>), Diunduh pada 11 Mei 2020.
- Tempo. 2019. “Berapa Banyak Penyandang Disabilitas Di Indonesia?” (online) (<https://difabel.tempo.co/read/1266832/berapa-banyak-penyandang-disabilitas-di-indonesia-simak-data-ini>). Diakses pada tanggal 19 November 2019.
- Thohari, Slamet. 2014. “Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang”. *Indonesian Journal Of Disability Studies*. Vol.1(1). Hal : 32. (Online) (<https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/38>), Diunduh pada 10 Mei 2020.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.
- Westi, Apriliani. 2017. “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Vol. (15). Hal. 1. (Online)(<https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/670>). Diunduh pada 11 Mei 2020.
- Wowuling, Vanda, dkk. 2018. “Evaluasi Kebijakan Distribusi Program Beras Sejahtera di Desa Tolok 1 Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa”. *Scholar Google*. Vol. 4. Hal:8. (Online), (<https://ejournal.usrat.ac.id/index.php/JAP/article/view/19749>). Diunduh pada 8 Mei 2020.